

Model Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa

by @Turnitin Jogja

Submission date: 15-Jul-2022 06:59AM (UTC-0700)

Submission ID: 1849624028

File name: 1987-Article_Text-6041-1-18-20220328_revisi_2.docx (65.57K)

Word count: 5383

Character count: 36783

.....

Abstrak

10

Berdasarkan data BPS, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia tahun 2019 sebesar 75,24 dan di tahun 2020 menunjukkan nilai 75,57, hal ini masih menunjukkan adanya ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender juga terjadi di tingkat desa, dan terdapat lebih dari 75.000 desa yang tersebar di 34 provinsi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran perempuan dalam pembangunan desa dan menemukan model yang relevan dengan kultur masyarakat untuk mengoptimalkan peran perempuan di ruang-ruang publik yang tersedia. Penelitian ini dilakukan di Desa Dadapayu Semanu Gunung Kidul DIY, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara kolaboratif antara wawancara, observasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, terdiri dari Kepala Kalurahan Dadapayu, Perangkat Kalurahan, Ketua Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan para pegiat perempuan. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian ini adalah: 1) peran perempuan dalam pembangunan desa di Kalurahan Dadapayu tergolong baik dibuktikan dengan tingginya antusiasme dan partisipasi yang tinggi, namun belum didukung dengan adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah desa dan tersedianya akses bagi perempuan untuk mengoptimalkan peran dalam pembangunan desa; 2) model optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa meliputi beberapa dimensi yaitu: komitmen pemerintah desa, visi dan misi desa, kebijakan desa tentang perempuan, kepemimpinan kepala desa, aksesibilitas bagi perempuan melalui lembaga-lembaga desa, dan partisipasi perempuan.

Kata kunci: optimalisasi, peran, perempuan, pembangunan, desa

Abstract

Based on BPS data, the Gender Empowerment Index (IDG) in Indonesia in 2019 was 75.24 and in 2020 it showed a value of 75.57, means there is still gender inequality. Gender inequality conditions also occur at the village level, and there are more than 75,000 villages spread across 34 provinces of Indonesia. This study aims to describe the role of women in village development and find models that are relevant to community culture to optimize the role of women in available public spaces. This research was conducted in Dadapayu Semanu Village, Gunung Kidul DIY, using a descriptive qualitative approach. Collecting data is done collaboratively between interview, observation, *Focus Group Discussion* (FGD), and documentation. Informants in this study were selected purposively, consist of the Head of the Dadapayu Village, the Village Head, the Head of the Family Welfare Program (PKK), and women activists. Data analysis used an interactive analysis model consisting of three main components, namely by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study are: 1) the role of women in village development in Kalurahan Dadapayu is classified as good as evidenced by high enthusiasm and high participation, but has not been supported by a high commitment from the village government and the availability of access for women to optimize roles in village development; 2) the model for optimizing the role of women in village development includes several dimensions, namely: village government commitment, village vision and mission, village policies on women, village head leadership, accessibility for women through village institutions, and women's participation.

Keywords: optimization, role, women, development, village

PENDAHULUAN

Persoalan peran perempuan dan desa selalu menarik untuk dikaji. UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa mengamanatkan masyarakat desa berdaulat atas dirinya dalam mengelola pembangunan dan menyelenggarakan desa selaku subyek pembangunan desa. Seiring dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), desa berperan yang strategis mendukung realisasinya. Sehingga dalam pembangunan desa harus mengarah pada pembangunan desa yang berkesinambungan. Dalam hal ini, fokus gerakannya ialah adanya kontribusi masyarakat desa. UU menjamin kontribusi semua unsur masyarakat seperti wanita dalam pembangunan desa bermula dalam hal merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi. Selaku bagian di masyarakat, wanita berhak dan bertanggungjawab dalam pembangunan desa. Sehingga optimalisasi perannya wanita ini dirasa penting untuk menjamin berjalannya pembangunan desa di Kelurahan Dadapayu sesuai dengan yang diharapkan.

Desa dipandang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah dan memiliki kewenangan terkait pengaturan dan pengurusan perihal pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasar pada prakarsanya masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang mendapat pengakuan dan dihormati pada sistem pemerintahan NKRI. Desa merupakan sebuah wilayah yang ditempati sekumpulan orang yang saling mengenal, hidup dengan bergotong royong, mempunyai adat istiadat yang cenderung sama dan memiliki pola khusus dalam mengelola kehidupan kemasyarakatannya (Nurcholis, 2011).

Dalam konteks pembangunan, desa bukan saja dianggap objek, tetapi selaku subjek pembangunan. Evaluasi hasil pembangunan dengan sudut pandang gender menggunakan sejumlah indikator seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG ialah perbandingannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara laki-laki dengan wanita berdasar mutu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonominya. IDG dipergunakan untuk mengetahui partisipasi aktif wanita di ranah ekonomi, politik dan manajerial. Adapun 3 indikator yang dipergunakan yakni persentase sumbangan wanita dalam pendapatan kerja, kontribusinya wanita dalam parlemen dan kontribusinya wanita dalam penentuan putusan melalui indikator wanita selaku tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi (kemenpppa.go.id). Berdasarkan data BPS tahun 2020 (<https://www.bps.go.id/indicator/40/468/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html>), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia tahun 2018 menunjukkan nilai 72,10, tahun 2019 senilai 75,24, dan di tahun 2020 menunjukkan nilai 75,57. Dalam kurun waktu tiga tahun, nilai IDG menunjukkan peningkatan, namun hal ini masih menunjukkan adanya ketimpangan gender.

Adanya kesenjangan gender juga ditemukan di desa, sementara di negara ini terdapat melebihi dari 75 ribu desa yang menempati 34 provinsi. IPG Kabupaten Gunung Kidul dalam kurun waktu tiga tahun menunjukkan angka yakni: tahun 2018 senilai 84,59, tahun 2019 senilai 84,62, dan tahun 2020 senilai 84,73. Apabila membandingkannya dengan IPG kabupaten/kota lain di Provinsi DIY, IPG Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan angka terendah (<https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/26/88/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-menurut-kabupaten-kota.html>). Oleh sebab itu saat ini persoalan pembangunan yang berpihak pada perempuan menjadi penting dan menjadi daya tarik tersendiri untuk dikaji.

Pembangunan SDM di Indonesia berhadapan pada masalah struktural dan budaya (Rosyidah & Nurwati, 2019). Dari segi struktural, pembangunan dengan berpihak kesetaraan gender harus didukung dengan memperkuat sistem, sudut pandang dan analisis gender bagi penentu kebijakan dan pihak yang melaksanakan program. Selanjutnya dari segi kultural, konstruksi gender yang menimbulkan kerugian sebuah komunitas jenis kelamin, khususnya wanita

dirasa masih kuat. Budaya patriaki masih ditemukan dalam realisasi kehidupan masyarakat yang berimbas pada hasil pembangunan. Stereotip yang senantiasa dibangun berdampak pada posisinya wanita yang dari segi kultural mendapat posisi cenderung rendah sehingga penentuan putusan dirasa belum seutuhnya memperhatikan kebutuhan dan kepentingan yang paling baik bagi wanita. Kondisi ini mempengaruhi pada pelaksanaan pembangunan dan bisa berimbas pada pencapaian pembangunan insan Indonesia. Tak dapat dipungkiri fenomena ini tergambar dalam potret pembangunan desa di wilayah Indonesia.

Kalurahan Dadapayu termasuk desa di wilayah pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul DIY. Semua desa yang berada di wilayah Provinsi DIY disebut dengan istilah “kalurahan” berdasar pada UU Nomor 13 Tahun 2012 mengenai Keistimewaan DIY. Kalurahan Dadapayu memiliki ciri-ciri geografis yaitu berada di wilayah pegunungan, berbatu dan curah hujan yang sangat terbatas. Mata pencaharian masyarakat setempat dominan sebagai petani ladang yang banyak melibatkan perempuan sebagai penggarapnya. Bila berdasar proporsi total penduduk laki-laki dan wanita, data menunjukkan tidak jauh berbeda. Demikian pula dengan data berdasarkan taraf pendudukannya yang berpendidikan di bawah tingkat SLTP pun tidak menunjukkan perbedaan yang berarti, seperti pada tabel berikut:

Kategori	Laki-laki	Perempuan	Total
Jenis kelamin	3931	3959	7890
Pendidikan di bawah SLTP	2644	2855	5499

Sumber: Statistik kependudukan DI Yogyakarta Semester 1 tahun 2021

Dari data tersebut memperlihatkan tidak adanya perbedaan jumlah yang mencolok antara laki-laki dan wanita di Kalurahan Dadapayu, namun terdapat 70% penduduk memiliki tingkat pendidikan di bawah SLTP dengan jumlah perempuan yang melebihi dari laki-laki. Hal ini bisa berpengaruh terhadap tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

Keterkaitan lainnya yaitu pada tataran ruang publik, keterlibatan perempuan masih sangat terbatas. Data keterlibatan perempuan pada anggota BPD masih belum mencapai 30%. Dari 11 anggota BPD Kalurahan Dadapayu hanya terdapat satu orang perempuan dan sisanya laki-laki. Lembaga-lembaga perempuan seperti PKK, Kader Keluarga Berencana, Kelompok Pengajian Ibu-ibu, dan kelompok-kelompok perempuan lainnya belum dapat menjadi akses atau ruang publik yang memberdayakan dan mengoptimalkan peran perempuan Kalurahan Dadapayu. Semangat dan antusiasme kaum perempuan untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pembangunan desa tergolong baik, namun hal ini masih didominasi oleh kelompok tertentu serta belum didukung sepenuhnya melalui komitmen dan kepemimpinan pemerintah desa.

Situasi di Desa Dadapayu dapat direfleksikan dengan Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 8 Tahun 2019 mengatakan bahwa IPG sebagai indikator yang mengungkapkan bagaimanakah penduduk sebuah wilayah berkesempatan mengakses hasil pembangunan selaku salah satu hak yang dimiliki dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Hal ini diperkuat oleh artikel Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI tentang Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan yang dirilis 15 November 2019 (<https://www.kemerkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan>) bahwa wanita bisa sebagai aktor strategis pada pembangunan. Dalam hal ini belaku pada pembangunan di desa ataupun secara nasional yang bisa merubah kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin baik dan tercapai kesejahteraan. Hal ini sebenarnya telah sinkron dengan kondisi yang ditunjukkan melalui data BPS tahun 2018 bahwa taraf pendidikan wanita melebihi dari laki-laki. Keadaan ini menjadi tidak sinkron dengan melihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPKA) wanita justru kebalikannya yakni lebih rendah daripada TPAK laki-laki. TPAK kebanyakan diisi laki-laki dengan partisipasinya ialah 83,18%. Sedangkan TPAK wanita senilai 55,5%. Demikian pula dengan Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 yang dicetuskan BPS, persentase laki-laki dalam kerja formal senilai 2x lipat daripada perempuan. Ironisnya dalam 10 tahun belakangan ini, tren

proporsi ini stabil dan terlebih wanita bekerja sangat riskan terkena *economic shocks*. Hal ini tidak terlepas dari pola dan sudut pandang terhadap posisi perempuan di tengah-tengah masyarakat desa.

Pada hakikatnya perannya wanita sangat dibutuhkan demi kelestarian budaya dalam bermasyarakat untuk diteruskan pada generasi selanjutnya. Prasekti & Rohmah (2017) mengungkapkan yakni wanita tidak lagi dipandang lemah, namun wanitalah yang berperan besar di rumah tangga dan masyarakatnya. Sehingga wanita tidak sekedar harus meningkat dari segi pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, namun harus berani dan berbesar jiwa dalam memaksimalkan kontribusinya dalam pembangunan. Demi kesuksesan pembangunan desa dibutuhkan perannya wanita secara maksimal. Dalam hal ini dukungan, dorongan moril, dan pengertiannya para lelaki terutama suami, sangatlah dibutuhkan.

Berdasarkan permasalahan bersangkutan, maka tujuannya penelitian ini untuk memberikan deskripsi peran wanita dalam pembangunan desa di Kalurahan Dadapayu dan menemukan model yang relevan dengan kultur masyarakat untuk mengoptimalkan peran perempuan di ruang-ruang publik yang tersedia. Situasi pandemi covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan desa, dan secara otomatis keterlibatan warga perempuan pun menjadi terdampak.

Urgensi dari kajian ini yaitu diperolehnya manfaat teoretik dan praktis untuk memperkaya diskursus tentang peran, partisipasi, dan akses perempuan dalam pembangunan desa, dan secara praktis dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk merumuskan kebijakan pembangunan desa yang berpihak pada perempuan secara holistik dan berkeadilan. Dengan demikian akan dapat dilihat upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Peneliti menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Pendapat Bogdan & Guba dalam Suharsaputra (2012), metode kualitatif ialah tahapan penelitian yang memperoleh data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis ataupun ucapan dari individu atau tingkahlaku yang dicermati. Sugiyono & Lestari (2021) mengungkapkan yakni penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berdasar pada filsafat postpositivismem, dipergunakan untuk mengkaji pada keadaan objek secara alami, dalam hal ini peneliti selaku instrumen kuncinya, adapun data dikumpulkan dengan teknik triangulasi, dan dianalisis secara induktif/kualitatif dan hasilnya cenderung menitikberatkan pada makna dibanding menggeneralisasikan.

Informan yang dipilih ialah Kepala Kalurahan Dadapayu, Perangkat Kalurahan, Ketua PKK, Ketua kelompok komunitas perempuan, tokoh masyarakat, pegiat perempuan, ibu-ibu rumah tangga. Data penelitian dikumpulkan dengan empat cara, yaitu wawancara mendalam, observasi, *Fokus Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Wawancara dilakukan kepada informan yang memiliki keterkaitan dengan peran perempuan di Kalurahan Dadapayu. Observasi dilakukan dengan mengamati situasi dan kondisi berkaitan dengan aktivitas perempuan Kalurahan Dadapayu dalam pembangunan desa. FGD dilakukan bersama perwakilan kaum perempuan dari berbagai kelompok, dan dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan arsip-arsip yang relevan dengan penelitian, serta aktivitas-aktivitas selama kegiatan penelitian dilakukan di kalurahan Dadapayu.

Data yang didapatkan, selanjutnya dilakukan analisis dengan model analisis interaktif hasil pengembangan dari Miles dan Huberman (Sutopo, 2006) yang meliputi 3 komponen inti yakni mereduksi data, menyajikan data serta menarik simpulannya dan memverifikasi. Kegiatan dari ketiga komponen ini dilaksanakan secara interaktif dan datanya dikumpulkan sebagai sebuah proses siklus. Data yang diperoleh dipastikan validitasnya dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan desa ialah pembangunan yang berkaitan dengan pemberdayaan (*empowerment*), yang tujuannya supaya kemampuan masyarakat dan lembaga desanya meningkat secara serentak. Sehingga pembangunan desa didesain sebagai pondasi yang kokoh bagi pembangunan daerah dan nasional. Disamping itu, diharap bisa membentuk pembangunan yang berwawasan ke depannya dan berkesinambungan. Melalui pemberdayaan, masyarakat berkesempatan untuk senantiasa mengembangkan kemampuan dan perannya dalam membuat perencanaan dan merubahnya sendiri apa yang diinginkan untuk meraih masa depan yang semakin baik (Bryant, dan White, dalam Manembu, 2017). Masyarakat yang berkesempatan mengembangkan kemampuan dan perannya termasuk di dalamnya adalah kaum perempuan di desa.

Optimalisasi peran perempuan Kalurahan Dadapayu dalam pembangunan desa terlihat mulai dari adanya komitmen yang kuat Pemerintah Kalurahan Dadapayu melalui pencapaian visi dan misi, kebijakan desa melalui penyediaan akses berupa lembaga-lembaga tingkat desa dan dusun yang memungkinkan para perempuan beraktivitas dan berperan lebih dalam pembangunan desa. Optimalisasi peran perempuan yang telah mendapat dukungan dari pemerintah kalurahan ini disambut baik oleh para perempuan Kalurahan Dadapayu dengan melakukan upaya-upaya nyata berupa kemauan yang kuat para perempuan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di tingkat desa dengan membagi waktu secara baik antara tugas sebagai ibu rumah tangga, kegiatan bertani, dan kegiatan-kegiatan di desa. Hal ini sangat dipengaruhi oleh motif yang kuat untuk ikut mamajukan desa.

Peran perempuan ini sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki menurut posisinya di rumah tangga ataupun masyarakat. Peran sebagai aspek yang dinamis dari kedudukan, maknanya individu sudah melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki menurut kedudukan masing-masing, sehingga orang bersangkutan sudah melaksanakan sebuah peran. John Scot (dalam Ahdiah, 2013) mendefinisikan peran selaki harapan yang diorganisasikan dengan bentuk interaksi tertentu yang mencetak orientasi motivasional seseorang kepada pihak lain. Dengan pola budaya, cetak biru atau contohnya seseorang belajar *siapakah* ia dihadapan orang lain dan *bagaimanakah* ia harus berperilaku kepada orang lain.

Peran dan status merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan sebab ada ketergantungan satu sama lain, maknanya tidak terdapat peran jika tidak ada status dan tidak terdapat status jika tidak adanya peran. Tiap individu bisa memiliki beberapa peran yang asalnya dari pergaulan hidup. Hal ini maknanya peran bersangkutan mempengaruhi apakah yang dilakukannya bagi masyarakat dan kesempatan dari masyarakat terhadapnya. Pentingnya peran ini sebab bisa mengorganisir tingkahlakunya individu dan menjadikan individu bisa memprediksi tindakan orang lain pada batasan tertentu, sehingga individu bisa menyesuaikan tingkahlakunya dengan tingkahlakunya orang lain dalam kelompoknya. Peran yang ditunjukkan oleh individu harus disesuaikan dengan posisi atau tempat pada pergaulan di masyarakat. Peran lebih mengarah ke fungsi, maknanya individu menempati sebuah posisi di masyarakat dan melakukan peran tertentu. Sebuah peran sedikitnya mencakup 3 hal yakni: 1) peran berupa norma yang dikaitkan dengan posisinya di masyarakat, 2) peran ialah sebuah konsep hal apakah yang bisa dilaksanakan seseorang di masyarakat dan 3) peran bisa dinyatakan selaku tingkahlakunya seseorang yang penting dalam struktur sosial masyarakat (Narwoko, 2011).

Pada dasarnya perempuan dapat berperan dalam berbagai bidang. Susilowati dkk (2020) dalam tulisannya memaparkan tentang perannya wanita dalam politik dan kebijakan. Kekuatannya wanita di bidang politik, khususnya dalam memberi pengaruh kebijakan publik merupakan hal penting dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini diketahui dari kaum wanita dalam memperjuangkan haknya setelah Reformasi Gereja di Prancis dengan gerakan Feminisme. Feminisme yang semula dengan tujuan untuk mendapat posisi yang setara dengan laki-laki selaku

2
subjek aktif misalnya di bidang pendidikan, lalu membentuk gerakan yang menghendaki kesetaraan di beragam bidang. Di Indonesia, kekuatan wanita di ranah politik ditunjukkan sewaktu periode kampanye pasca Pilpres 2019 dengan gerakan “emak-emak”. Disamping itu, dukungan pemerintah atas perannya wanita di legislatif juga terlihat melalui pengesahan UU No.8 Tahun 2012 mengenai Pemilu pasal 15 dan 55 tentang kuota 30% wakil partai dari perempuan. Hal ini patut diakui bahwa wanita dalam politik cukup signifikan secara praktis dan non praktis. Ketika pandemi sekarang ini, wanita juga menunjukkan peran signifikan yakni dengan pola *top down* selaku anggota pemerintahan ataupun dengan pola *bottom up* selaku masyarakat sipil yang dapat menekan kebijakan publik.

Dalam konteks pembangunan desa, Darmi (2016) mengkaji tentang optimalisasi peran wanita dengan basis modal sosial. Perannya wanita dalam membuat perencanaan penyelenggaraan program desa (APBDesa) bisa menampung suaranya melalui kebutuhan masyarakat berdasar nilai, norma dan kultur. Dengan optimalisasi perannya wanita bisa berkontribusi aspirasinya masyarakat dan transparansi pengelolaan dana desa yang seluruhnya bisa dipergunakan selaku modal sosial desa untuk membentuk pemerintahan yang bersih dalam mengelola dana desa. Temuan dari penelitian ini yakni minimnya kesetaraan gender dikarenakan sejumlah faktor seperti faktor sosial, budaya dan tradisi yang ada di masyarakat serta kebijakan, regulasi dan program kerja belum terkonsentrasi pada gender. Pemahaman yakni kaum wanita dapat berperan dalam kerumahtanggaan sementara bagi laki-laki lebih bebas berkontribusi dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga berimbang pada minimnya kiprah wanita baik keterlibatannya pada jabatan di pemerintahan desa ataupun pada proses dan penyelenggaraan pembangunan desa. Supaya optimalisasi perannya wanita dalam mengelola dana desa bisa terealisasi, harus ada langkah konkret dan komitmen bersama seluruh *stakeholder* yang diawali dengan menguatkan kelembagaan wanita di desa dengan PKK, posyandu, dasawisma dan lainnya. Selain itu perlu membentuk jaringan personal dan komunitas, jaringan ini selaku modal sosial yang bisa membantu semua masalah yang dialami wanita.

29
Kajian ini menunjukkan hasil bahwa komitmen pemerintah desa dalam membuka kesempatan yang sama antara laki-laki dan wanita untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan desa menjadi dimensi utama bagi optimalisasi perannya wanita dalam pembangunan desa. Hal ini tidak terlepas dari kepemimpinan kepala kalurahan yang dapat dilihat dari visi dan misi Pemerintah Kalurahan Dadapayu dan diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan desa. Kebijakan desa terkait dengan ketersediaan lembaga desa berbasis perempuan yang dapat dijadikan akses dan menjadi wadah bagi kaum perempuan untuk mengoptimalkan perannya.

Mengikutsertakan wanita dalam pelaksanaan pembangunan desa, tidak dimaknai selaku tindakan yang dianggap dari segi humanisme saja. Tetapi perannya wanita dalam keikutsertaan di bidang pembangunan desa sebagai tindakan untuk meningkatkan harkat dan mutu wanita. Partisipasinya wanita sebagai persyaratan mutlak dalam usaha merealisasikan pembangunan dan berkeadilan.

Secara kelembagaan, komitmen pemerintah Kalurahan Dadapayu tercermin dalam visi dan misi Kepala Kalurahan. Adapun visi Kalurahan Dadapayu adalah “*Seko nDeso neng Malioboro, bali nDeso nyejahterakke uripe warga mulyo lan sentoso adil, makmur berdasar Pancasila*” (dari desa ke Malioboro/kota, kembali ke desa untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat menuju sejahtera adil makmur berdasar Pancasila). Visi ini dijabarkan ke dalam sejumlah misi sebagai berikut: Pertama, meneruskan program yang dilakukan pemerintah/kepala desa Dadapayu dengan: 1) melakukan reformasi birokrasi dengan meningkatkan profesionalisme melalui menata struktur sesuai porsinya dan menerapkan penghargaan dan hukuman dengan basis kinerja, 2) melakukan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan publik di desa, 3) melakukan peningkatan kinerja dalam mengelola keuangan yang menunjukkan transparansi, akuntabilitas dan profesional. Kedua, mendayagunakan apa saja yang terdapat di masyarakat. Arah kebijakan pembangunan untuk merealisasikan misi ini ialah: 1) melakukan pengembangan PAUD, 2)

melakukan peningkatan pelayanan kesehatan khususnya untuk ibu dan anak, 3) melakukan peningkatan ketersediaan tempat tinggal dan sarana prasarana dasar pemukiman dan 4) melakukan peningkatan mutu dan jumlahan kesejahteraan sosial personal, keluarga dan komunitas masyarakat dengan memberdayakan masyarakat. Jika dilihat dari visi misi Kalurahan Dadapayu tidak ada misi yang menyebutkan komitmennya pada optimalisasi peran perempuan.

Komitmen pemerintah desa untuk melibatkan kaum perempuan dalam berbagai program pembangunan merupakan kunci bagi optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa. Pada dasarnya semua program pembangunan di Kalurahan Dadapayu telah melibatkan perempuan tetapi masih didominasi oleh kelompok tertentu, terutama adalah istri para perangkat desa. Komitmen pemerintah desa ini dapat dilihat dari sikap apresiatif terhadap keterlibatan perempuan dalam forum-forum desa. Usulan-usulan dari kaum perempuan mendapatkan tanggapan yang baik. Pemerintah Desa memandang bahwa pembangunan itu harus dapat dimanfaatkan oleh semua wargan baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun demikian, apresiasi pemerintah kalurahan dan warganya terhadap keterlibatan perempuan dalam program pembangunan sudah diupayakan, hal ini dapat dilihat dari adanya 2 (dua) orang Dukuh perempuan di Kalurahan Dadapayu. Proses seleksi perangkat desa berlangsung sangat demokratis dan tidak diskriminatif. Warga perempuan yang mencalonkan diri dan memenuhi persyaratan akan lolos seleksi sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan.

Kebijakan Kalurahan Dadapayu terhadap lembaga-lembaga desa berbasis perempuan sebagai wadah aspirasi perempuan masih belum secara optimal dilaksanakan dan juga belum menjadi sebuah pedoman terhadap pembangunan di kalurahan. Beberapa kegiatan kelompok ibu-ibu di Kalurahan Dadapayu masih berjalan hanya karena faktor keterikatan antara para pelaku kegiatan itu sendiri akan tetapi secara formal Kalurahan belum membuat sebuah aturan baku yang menjadi pedoman dan arah kerja pada setiap kegiatan kelompok ibu-ibu di Kalurahan Dadapayu.

Visi-misi yang menjadi manifestasi dari komitmen pemerintah kalurahan selain dapat dilihat dari produk-produk kebijakan kalurahan, juga dapat dilihat dari pola kepemimpinan kepala kalurahan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Lurah Dadapayu menyatakan bahwa dalam kepemimpinannya di Kalurahan Dadapayu, keberadaan perempuan dalam kegiatan kalurahan masih penting. Perempuan saat ini memiliki posisi dan derajat yang sama dengan laki-laki dalam berbagai hal. Dengan demikian perempuan juga memiliki peran yang besar dan sama dalam pembangunan di suatu wilayah seperti di Kalurahan Dadapayu ini. Namun dengan adanya ruang pada perempuan juga tidak melupakan kodrat sebagai ibu dalam keluarga.

Dalam kepemimpinan di Kalurahan Dadapayu belum terlihat memiliki arah dan desain yang jelas tentang optimalisasi peran perempuan dalam membuka ruang, kesempatan dan pemberdayaan secara berkesinambungan bagi para perempuan. Ada banyak sumber daya yang dimiliki oleh perempuan akan tetapi belum mampu dioptimalkan dan digunakan sebagai kekuatan dan sumber daya dalam pembangunan di Kalurahan Dadapayu Semanu. Hal ini dapat dilihat bahwa aksesibilitas perempuan Kalurahan Dadapayu dalam lembaga-lembaga desa belum optimal, sehingga partisipasinya pun belum secara penuh dapat dilihat dalam keseluruhan aktivitas pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Lembaga desa berbasis perempuan yang sudah resmi hanya PKK, selanjutnya lembaga-lembaga lain masih berjalan hanya sebatas interaksi dan komunikasi antar peronil tetapi belum terlembagakan secara formal di Kalurahan Dadapayu yang tertuang dalam peraturan desa. Personil yang selama ini terlibat dalam forum-forum perempuan yang disebut kader adalah para istri dukuh dan ketua RW dan RT. Ini menggambarkan bahwa perempuan yang terlibat dalam kegiatan di pembangunan di Kalurahan Dadapayu masih sebatas pada kelompok tertentu yang memiliki keterkaitan dengan struktural pemerintahan kalurahan.

Optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa sangat tergantung dari tingkat partisipasi dari kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam forum-forum dan lembaga-lembaga desa tersebut. Partisipasi ini dimulai dari adanya kemauan yang kuat untuk berkontribusi secara

aktif dalam pembangunan desa. Kemauan ini didukung oleh adanya kemampuan dan pengalaman sehingga keterlibatan para perempuan di Kalurahan Dadapayu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keterlibatan perempuan salah satunya dapat dilihat juga pada struktur Pemerintah Kalurahan Dadapayu, dari 33 orang perangkat, lima diantaranya adalah perempuan. Kelima orang perangkat perempuan ini juga melalui seleksi yang sangat ketat bersaing dengan kaum laki-laki. Dalam hal menjalankan tugas di pemerintahan desa, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua bekerja sesuai dengan tupoksinya, bahkan jika dilihat dari sisi waktu bekerja, tidak ada perbedaan karena yang diutamakan adalah kinerja dari para perangkat desa tersebut.

Pemerintah kalurahan Dadapayu telah berupaya mengapresiasi kontribusi para perempuan dalam pembangunan desa. Kontribusi tersebut dimulai dari keterlibatan yang sangat baik perempuan dalam forum-forum di desa. Dengan demikian pemerintah desa dapat dengan mudah mengakomodasi kebutuhan perempuan. Aspirasi para perempuan diakomodasi dalam pembuatan RKP dan APBDes, dilihat dari tingkat urgensi dari kebutuhan tersebut. Apresiasi ini sangat didukung oleh adanya kekompakan para perempuan dalam forum-forum desa. Kekompakan tersebut juga dapat dilihat dari tingkat partisipasi perempuan di Kalurahan Dadapayu yang tergolong tinggi. Sebelum terjadi pandemi covid-19, kehadiran perempuan di forum-forum desa dapat mencapai sekitar 100 orang dari total 207 orang kader yang ada di Kalurahan Dadapayu, dan rata-rata kader punya andil yang cukup besar dalam proses pembangunan desa. Namun demikian, dari keseluruhan perempuan yang aktif tersebut masih didominasi oleh kalangan elit desa, yaitu para istri Dukuh dan perempuan yang ditokohkan di wilayah tersebut.

Memotivasi perempuan supaya memiliki keterlibatan dalam penentuan putusan bukan sesuatu yang remeh. Tingkat pendidikan para wanita yang rata-rata berpendidikan relatif rendah, menjadikan wanita tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengungkapkan opininya. Tetapi dengan adanya akses dan kesempatan yang diberikan, termasuk dalam kegiatan musyawarah yang melibatkan perempuan, lama kelamaan wanita akan terbiasa mengungkapkan pendapatnya. Langkah yang paling efektif untuk meningkatkan motivasi wanita ialah melalui pendekatan terhadap kelompok level RT atau dusun, karena kelompok tersebut memiliki kekuatan, selanjutnya dari komunitas ini dibentuk jejaring sebab informasi umumnya diperoleh dari jejaring. Relasi jejaring yang paling efektif adalah melalui kelompok PKK dan pengajian.

Terkait dengan pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dalam pembangunan desa di Kalurahan Dadapayu, sebenarnya tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan warga masyarakat ada yang pro dan kontra jika melihat ada perempuan yang maju sebagai pemimpin. Hal tersebut bermula dari pandangan sebagian warga masyarakat bahwa perempuan itu tempatnya di rumah, tidak pantas menjadi "imam" dan pasti tidak bisa "mengimami" seluruh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut dapat muncul karena faktor rendahnya tingkat pendidikan dan wawasan sumber daya manusianya, walaupun di Kalurahan Dadapayu tidak ada perbedaan kesempatan menempuh pendidikan bagi kaum laki-laki dan perempuan, semua punya kesempatan yang sama. Banyak perempuan di Kalurahan dadapayu yang tidak berpendidikan tinggi namun dapat terlibat aktif dan berkiprah secara konstruktif dalam pembangunan desa karena adanya faktor pengalaman di dunia kerja yang dapat dijadikan modal untuk aktif di masyarakat. Partisipasi ini dimulai dari adanya kemauan yang kuat untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan desa. Kemauan ini didukung oleh adanya kemampuan dan pengalaman sehingga keterlibatan para perempuan di Kalurahan Dadapayu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, walaupun hasilnya belum dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat.

Faktor pendukung utama keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa di Kalurahan Dadapayu adalah dukungan suami. Secara kultural, pandangan masyarakat tentang kesetaraan gender belum sepenuhnya dipahami bahwa kaum laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan aktif di luar rumah. Namun, fenomena yang terjadi di Kalurahan Dadapayu, sudah terjadi pergeseran pandangan, sebagian warga masyarakat memandang bahwa kaum perempuan pun layak untuk maju dan memimpin. Faktor pendukung lainnya adalah adanya

kemauan untuk maju dan belajar yang tinggi. Kader perempuan Kalurahan Dadapayu mayoritas memiliki kemauan yang kuat untuk maju dan mau belajar untuk menimba pengalaman.

Di samping adanya faktor pendukung, terdapat juga faktor penghambat optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa di Kalurahan Dadapayu, yaitu (1) rendahnya pendidikan politik masyarakat. Banyak perempuan Dadapayu sebenarnya banyak yang bisa tampil sebagai pemimpin di desa (contohnya sebagai Lurah) tapi sayangnya pendidikan politik masyarakat masih sangat kurang. Orang yang tidak punya dukungan finansial yang cukup itu susah untuk jadi; (2) Keterbatasan waktu karena harus berbagi dengan tugas domestik dan mengurus lahan pertanian.

Jika dilihat secara umum bahwa pemerintah Kalurahan Dadapayu telah memberi perhatian pada kelompok-kelompok perempuan akan tetapi sektor-sektor yang menjadi fokus pemerintah kalurahan lebih banyak pada sektor yang bersifat aktifitas rutin yang sering dilakukan oleh para perempuan. Sektor politik merupakan satu sektor yang belum terwadahi dan belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kalurahan Dadapayu. Penguatan kapasitas politik perempuan dalam menyampaikan aspirasi, dan mengakses ruang publik yang ada di Kalurahan Dadapayu masih rendah. Aktifitas pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan belum dilakukan secara berkelanjutan sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan pola pikir dan penguatan kapasitas dari kelompok perempuan yang ada di Kalurahan Dadapayu.

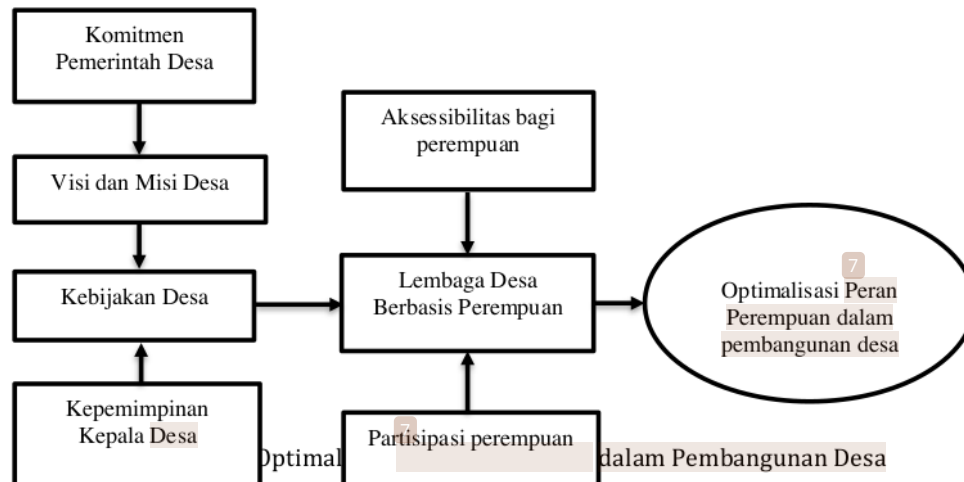
Jika menilik tentang peran perempuan, semestinya dilihat bahwa kekuatan wanita tidak diremehkan. Wanita banyak berperan dalam memberi pengaruh kebijakan publik secara langsung ataupun tak langsung. Wanita sebagai suatu kekuatan alternatif sewaktu sosial politik di masyarakat dirasa terjadi fase buntu. Perannya wanita tidak bisa diremehkan sebab peran pokoknya dalam rumah tangga, yakni keluarga sebagai landasan dasar suatu bangsa dan negara. Hal ini dipertegas oleh Syarifudin (2017), yakni wanita berperan penting yang strategis dalam kualitas suatu bangsa melalui peran selaku ibu, istri atau anak dalam keluarga yang bisa berdampak terhadap masyarakat yang luas.

Perempuan baik selaku warga negara atau sumber subjek pembangunan berhak dan berkewajiban serta berkesempatan yang sama dengan lelaki untuk semua aktivitas pembangunan di semua bidang kehidupan. Perannya wanita ini sudah diakomodir oleh sejumlah aturan pembangunan nasional misalnya UU No 6 tahun 2014 mengenai desa, yakni peran serta wanita sangat dibutuhkan bagi kesuksesan pembangunan desa.

Optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa pada prinsipnya berbicara tentang kesetaraan dan kemitraan yang harus dibangun melalui komunikasi dialogis. Komunikasi dialogis merupakan iklim komunikasi terbuka dan kondusif sehingga memungkinkan terjadinya dialog dalam proses pembangunan desa. Dalam hal ini tidak ada dominasi laki-laki terhadap perempuan. Jika hal ini dapat dicapai maka akan terjadi pembagian kewenangan (*sharing power*) dan kesetaraan kewenangan (*equal-powership*) dalam pembangunan desa karena berbagai pihak berusaha menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari dominasi gender. Demikian pula dalam hal kesetaraan tanggung jawab (*equal responsibility*), semua pihak baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses pembangunan desa sehingga semua dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan menentukan langkah-langkah pembangunan desa secara jelas. Di sinilah terjadi pelibatan aktif dan kerjasama perempuan dalam pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi yang dimiliki setiap pihak, sehingga terjadi proses belajar bersama dan saling memberdayakan satu sama lain.

Demikianlah terdapat beberapa dimensi dalam model optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa, dimulai dari adanya komitmen pemerintah desa yang dijabarkan ke dalam visi dan misi desa dan kebijakan-kebijakan desa berkaitan dengan dibentuknya lembaga-lembaga desa berbasis perempuan. Faktor penentu dalam proses ini adalah kepemimpinan kepala desa karena kepemimpinan inilah yang akan menggambarkan adanya kemungkinan aksesibilitas bagi perempuan sebagai ruang publik perempuan untuk saling belajar dan berpartisipasi secara aktif

dalam setiap proses pembangunan. Adapun modelnya sebagai berikut,



KESIMPULAN

Optimalisasi peran perempuan Kalurahan Dadapayu dalam pembangunan desa terlihat mulai dari adanya komitmen yang kuat Pemerintah Kalurahan Dadapayu melalui pencapaian visi dan misi, kebijakan desa melalui penyediaan akses berupa lembaga-lembaga tingkat desa dan dusun yang memungkinkan para perempuan beraktivitas dan berperan lebih dalam pembangunan desa. Optimalisasi peran perempuan yang telah mendapat dukungan dari pemerintah kalurahan ini disambut baik oleh para perempuan Kalurahan Dadapayu dengan melakukan upaya-upaya nyata berupa kemauan yang kuat para perempuan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di tingkat desa dengan membagi waktu secara baik antara tugas sebagai ibu rumah tangga, kegiatan bertani, dan kegiatan-kegiatan di desa. Hal ini sangat dipengaruhi oleh motif yang kuat untuk ikut mamajukan desa.

Komitmen pemerintah desa dalam membuka kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk aktif terlibat dalam pembangunan desa menjadi dimensi utama bagi optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa Dadapayu. Hal ini tidak terlepas dari kepemimpinan kepala desa yang dapat dilihat dari visi dan misi dan diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan desa. Kebijakan desa terkait dengan ketersediaan lembaga desa berbasis perempuan yang dapat dijadikan akses dan menjadi ruang publik bagi kaum perempuan untuk mengoptimalkan perannya.

Optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa sangat tergantung dari tingkat partisipasi dari kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam forum-forum dan lembaga-lembaga desa tersebut. Partisipasi ini dimulai dari adanya kemauan yang kuat untuk berkontribusi secara

aktif dalam pembangunan desa. Kemauan ini didukung oleh adanya kemampuan dan pengalaman sehingga keterlibatan para perempuan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiah, Indah. (2013). Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat. *Jurnal Academica Fisip Untad*. Vol. 05(3), 1085-1092.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Indonesia 2018* (Statistical Yearbook of Indonesia 2018), Jakarta: CV. Dharma Putra.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks Pemberdayaan Gender. <https://www.bps.go.id/indicator/40/468/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul. (2021). Indeks Pembangunan Gender. <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/26/88/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-menurut-kabupaten-kota.html>.
- Darmi, Titi. (2016). Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial Pada Sektor Pemerintahan Desa (Study Pada Pengelolaan Dana Desa). *JURNAL ANTROPOLOGI: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 18 (1), 21-27.
- Kemenko PMK. (2019). *Perempuan dan Anak. Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Pembangunan*. Artikel. Jakarta. <https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. (<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/50a46-pembangunan-manusia-berbasis-gender-2020.pdf>).
- Manembu, Angelia E. (2017). Peranan Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat Desa (suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 6(1), 21-28.
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019. Jakarta: Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/c73cb-permen-no-8-thn-2019-ttg-renstra-kpppa.pdf>
- Narwoko, Dwi J dan Bagong Suyanto. (2011). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*: Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Prasekti, Y. ., & Rohmah, I. S. . (2017). Peran Wanita Tani dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani. *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita.5 Vol Oktober 2017*, 1-16.
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). Statistik kependudukan DI Yogyakarta Semester 1 2021. <https://kependudukan.jogjapro.go.id/statistik>
- Rosyidah, Feryna Nur & Nunung Nurwati. (2019). Gender dan Stereotipe: Konstruksi Realitas dalam Media Sosial Instagram. *Share: Social Work Jurnal*, Vol 9 (1), 10-19.
- Susilowati, Ida, Fadhlun Nur Hakiem. (2020). Optimalisasi Peran Perempuan Sebagai Strategi Alternatif Kebijakan Publik Dalam Menekan Penyebaran Pandemi Covid-19. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 7(8), 723-736.
- Sugiyono & Puji Lestari (2021). *Metode Penelitian Komunikasi Bandung*: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. (2012). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan)*. Bandung: Refika Aditama.

Sutopo, HB. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Edisi Kedua. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Syarifudin, Achmad. (2017). Peran Strategis Kaum Perempuan Dalam Mewujudkan Masyarakat Religi, dalam *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol 12(01), 21-32.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Model Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	1%
2	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
3	www.batukarinfo.com Internet Source	1%
4	jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
6	repo.apmd.ac.id Internet Source	1%
7	reitaniainggolan.blogspot.com Internet Source	<1%
8	core.ac.uk Internet Source	<1%
9	journal.ipb.ac.id Internet Source	<1%

10	ejournal.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
11	culture.ppj.unp.ac.id Internet Source	<1 %
12	eprints.uniska-bjm.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.berdesa.com Internet Source	<1 %
14	gunungkidulkab.bps.go.id Internet Source	<1 %
15	lakilakibaru.or.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
17	doku.pub Internet Source	<1 %
18	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1 %
19	www.kemenpppa.go.id Internet Source	<1 %
20	Nur Hidayah. "Gender, Pengetahuan Keuangan, dan Niat Bertansaksi Saham", Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia, 2018 Publication	<1 %

21	armandaekatadeusginting.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	bpkn.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	ejournal.pin.or.id Internet Source	<1 %
24	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	<1 %
25	www.tiraswati.net Internet Source	<1 %
26	Hajmi Fakhri, Lina Marlina. "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENINGKATKAN DEMOKRASI LOKAL", Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik, 2020 Publication	<1 %
27	docplayer.info Internet Source	<1 %
28	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
29	investor.id Internet Source	<1 %
30	m.bizlaw.id Internet Source	<1 %

31

sendawakurasapisang.blogspot.com

Internet Source

<1 %

32

Dahlia Novarianing Asri, Dian Ratnaningtyas Afifah, Diana Ariswanti Triningtyas.

"IMPLEMENTASI PELATIHAN PERSONAL DEVELOPMENT DALAM MENGEMBANGKAN KONSEP DIRI POSITIF PADA WARGA RUMAH PINTAR "BUNGA PADI" DI KABUPATEN MADIUN", *Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 2016

Publication

<1 %

33

digilib.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

34

ejournal.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

35

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

36

www.neliti.com

Internet Source

<1 %

37

Muhammad Agus Fanani, Suyoto Suyoto.
"Peningkatan Motivasi Berprestasi Dan Hasil Belajar Matematika Pada Materi Transformasi Geometri Siswa Kelas Xi Tsm – 1 SMK Muhammadiyah 2 Jogoroto Melalui Pembelajaran Model Discovery Learning",

<1 %

DIDAKTIKA : Jurnal Pemikiran Pendidikan, 2020

Publication

38

desaciwidey.wordpress.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On